

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan memahami jejaring wacana dalam debat publik mengenai isu “Pajak Naik Menjadi 12 Persen” pada media sosial X dengan menggunakan pendekatan *Discourse Network Analysis* (DNA) melalui pendekatan dengan Teori Graf dan Teori *Discourse Coalition Framework* (DCF). Hasil penelitian dengan pendekatan ini berhasil mengidentifikasi wacana dalam debat publik, koalisi wacana yang dibangun oleh para aktor, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana dominasi proses wacana terjadi, serta bagaimana jejaring yang terbentuk dalam debat publik pada dimanika diskursif di ruang digital. Pada penelitian yang dilakukan terdapat 52 wacana dan 385 aktor yang terhimpun dalam 30 organisasi.

Hasil analisis yang ditemukan menunjukkan bahwa struktur jejaring wacana “Pajak Naik Menjadi 12 Persen” di media sosial X bersifat polisentris, heterogen, dan terfragmentasi, di mana setiap aktor cenderung berafiliasi pada kelompok wacana tertentu yang merepresentasikan posisi ideologis atau kepentingan masing-masing. Dalam konteks ini terdapat dua koalisi utama yang menonjol, yakni koalisi prokebijkan yang umumnya diisi oleh aktor institusional seperti kementerian, lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, satu serikat keagamaan, dan segelintir warganet. Sedangkan koalisi kontra kebijakan didominasi oleh warganet, serikat warga, aktor, musisi, *homeless media*, media massa online, akademisi, serta serikat keagamaan menyoroti dampak sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Analisis tingkat sentralitas mengungkap bahwa aktor non-institusional (seperti individu dan koalisi masyarakat) memiliki nilai *degree*, *betweenness*, dan *closeness centrality* yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktor institusional (seperti pemerintah dan media), yang menunjukkan peran dominan mereka dalam membentuk dan mengarahkan wacana penolakan “Pajak Naik Menjadi 12 Persen”. Hal ini menunjukkan hipotesis penelitian ini (H₁) diterima. Akun X serikat warga @barengwarga memiliki nilai *degree centrality* tertinggi yang memiliki peran sebagai penghubung utama dalam arus informasi, akun ini juga memiliki nilai *betweenness centrality* dan *closeness centrality* tertinggi dibandingkan aktor lainnya sehingga akun ini memiliki posisi sentral dalam menjembatani aktor lain dengan wacana-wacana yang digaungkan secara cepat dan dekat. Dengan demikian, distribusi kekuasaan diskursif tidak bergantung pada otoritas formal, tetapi pada posisi struktural aktor dalam jejaring percakapan publik (*micro power*).

Pada bahasan wacana atau konsep, penelitian ini menemukan bahwa wacana “Kenaikan PPN mencekik masyarakat”, “Kenaikan PPN berdampak pada kenaikan harga kebutuhan primer”, dan “Penggunaan Buzzer pengalih isu kenaikan PPN” menjadi simpul wacana yang digunakan untuk mengartikulasikan posisi pro atau kontra para aktor dalam debat publik. Hal ini membuktikan bahwa pembentukan makna atas keresahan dan kesulitan yang dialami masyarakat menjadi titik nadir untuk membentuk wacana yang mendominasi.

Dalam konteks jejaring yang terjadi kelompok warganet, masyarakat sipil, mahasiswa, dan *homeless media* mendominasi wacana dalam debat publik dengan narasi yang menyoroti aspek ketimpangan dan beban ekonomi yang dialami

masyarakat. Sedangkan lembaga pemerintahan, BUMN, dan segelintir warganet yang disinyalir buzzer menyoroti kenaikan PPN sebagai langkah strategis bagi negara.

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahawa ruang digital bukan sekadar arena penyebaran informasi, melainkan sebuah arena diskursif tentang pertarungan politik antarwacana yang berperan penting dalam membentuk opini publik dalam proses legitimasi kebijakan. Metode DNA dalam penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana relasi sosial dan struktur komunikasi membentuk kontestasi makna dalam kebijakan yang akan pemerintah sahkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika wacana “Pajak Naik Menjadi 12 Persen” mencerminkan perubahan pola komunikasi dalam instrumentasi kebijakan publik di era digital. Pada era ini kekuasaan diskursif terdistribusi melalui jejaring aktor yang kompleks, melampaui batas institusional tradisional. Dengan demikian, penelitian menggunakan metode DNA memberikan kontribusi penting dalam memahami proses demokratisasi dan pembentukan opini publik di media sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapt beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan akademik ataupun praktik komunikasi kebijakan publik.

5.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data dengan periode waktu yang lebih panjang serta melibatkan lebih dari satu platform

media sosial. Dengan demikian, dinamika pembentukan wacana dapat dilihat secara lebih utuh dan lintas konteks. Kombinasi metode *Discourse Network Analysis* dengan analisis sentimen atau analisis framing juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara struktur jejaring dan narasi yang terbentuk;

2. Dalam konteks metodologi, penelitian berikutnya dapat memperkaya dimensi analisis dengan menambahkan aspek temporal dan intertekstual, misalnya dengan melihat perubahan posisi aktor atau konsep dari waktu ke waktu. Pendekatan longitudinal dalam DNA akan membantu menelusuri evolusi wacana kebijakan publik secara lebih mendalam.

5.2.2 Saran Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan untuk memperhatikan pola komunikasi publik di ruang digital sebelum merumuskan atau mengumumkan kebijakan yang akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan publik. Pemerintah perlu melibatkan aktor-aktor sentral dalam jaringan wacana sebagai jembatan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan publik terhadap kebijakan.
2. Kepada masyarakat Indonesia, termasuk saya. Kita sangat perlu meningkatkan literasi dalam hal apa pun khususnya terkait kebijakan publik sehingga kita dapat kritis dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan dengan informasi yang valid dan rasional. Kita adalah wakil Tuhan di negara kita, dan pemerintah adalah pelayan kita. *Vox populi, vox dei*.